



Pertumbuhan Ekonomi sebagai Moderator Pengaruh Pajak, Retribusi, dan Dana Perimbangan

Economic Growth as Moderator of Taxes, Retribution, and Balancing Fund Effects

Sri Dewi Fitrianiingsih^{1*}, I Kadek Bellyoni Dwijaya², Santi Rahmawaty³

^{1,2,3}Universitas Abdul Azis Lamadjido

*Corresponding Author: E-mail: dewimadika@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 30 Apr, 2025

Revised: 14 May, 2025

Accepted: 16 May, 2025

Kata Kunci:

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi

Keywords:

Regional Tax, Regional Retribution, Balancing Fund, Capital Expenditure, Economic Growth

DOI: [10.56338/jks.v8i5.7386](https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7386)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap belanja modal. Studi ini mencakup seluruh 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2019–2023. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan pendekatan Moderated Regression Analysis (MRA). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Sebaliknya, dana perimbangan menunjukkan pengaruh yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi terbukti mampu memoderasi hubungan antara dana perimbangan dan belanja modal, namun tidak berfungsi sebagai moderator terhadap pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah. Fenomena flypaper effect yang teridentifikasi mengindikasikan perlunya evaluasi serta optimalisasi kebijakan fiskal daerah, khususnya terkait pajak dan retribusi, guna mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat dan mendorong investasi dalam proyek-proyek infrastruktur yang berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the ability of economic growth to moderate the influence of local taxes, local levies, and equalization funds on capital expenditures. All 13 regencies/cities in Central Sulawesi Province were sampled in this study, with a period from 2019 to 2023. The data analysis method uses multiple linear regression with analysis techniques using Moderated Regression Analysis (MRA). The results show that local taxes and local revenues have no significant effect on capital expenditure. In contrast, balancing funds have a significant effect on capital expenditure; economic growth is able to moderate the influence of balancing funds. Still, it does not moderate local taxes and local revenues in districts/cities in Central Sulawesi Province. Due to the flypaper effect, district/city governments need to evaluate and optimize local tax and levy policies so as not to depend on central revenue and prioritize projects that have a significant impact on infrastructure development and community welfare that support economic growth.

PENDAHULUAN

Peningkatan ekonomi menjadi tujuan pokok yang hendak diraih oleh pemerintah, baik di level nasional maupun lokal. Indikator ini menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi dapat memicu pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dalam periode tertentu. (Sudika and Budiarta 2017). Untuk mewujudkan prinsip *good governance*, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangan secara

transparan dan akuntabel agar dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang stabil turut berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah secara menyeluruh, serta memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan (Lestari and Basuki 2024). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi elemen penting dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya fiskal daerah di tengah dinamika perekonomian yang terus berubah.

Kebijakan fiskal yang efektif meliputi penerimaan pajak daerah, retribusi, dan dana transfer pusat memegang peran krusial dalam menjawab masalah pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta menstimulasi ekonomi berkelanjutan lewat alokasi belanja modal yang tepat. Pasca implementasi otonomi daerah di Indonesia, pemerintah lokal kini memiliki kewenangan penuh untuk mengatur urusan pemerintahan, termasuk perencanaan dan eksekusi APBD. Namun, tantangan utama terletak pada optimalisasi anggaran di tengah keterbatasan sumber pendapatan. Kondisi ini menuntut kemampuan pemerintah daerah untuk memprioritaskan pengeluaran yang bersifat investatif dan berdampak jangka panjang (Wahyudi and Handayani 2015). Saat ini, banyak daerah cenderung memprioritaskan belanja operasional dibandingkan belanja modal, padahal belanja modal memiliki dampak lebih besar terhadap kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penting bagi alokasi anggaran untuk difokuskan pada sektor-sektor yang mendukung pembangunan, seperti infrastruktur, layanan kesehatan, dan (Aspan, Khaddafi, and Lestari 2016; Eksandy, Hakim, and Ekawati 2018; Jayanti 2020; Pudjut Harianto and Chechelya Aulia Savira Putri 2021).

Efektivitas alokasi anggaran daerah khususnya belanja investasi di Sulawesi Tengah menjadi faktor penentu dalam mendorong kemajuan ekonomi dan perbaikan infrastruktur. Sumber pendanaan utama provinsi ini berasal dari tiga komponen vital, yaitu penerimaan pajak lokal, retribusi, serta transfer dana pusat. Mekanisme fiskal tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penggerak roda perekonomian, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas layanan masyarakat dan percepatan pembangunan wilayah secara holistik.

Pajak daerah dan retribusi merupakan bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari wilayah masing-masing. Dalam kerangka otonomi daerah, peningkatan PAD selalu menjadi fokus karena digunakan untuk mendanai operasional pemerintahan daerah (Rahmitasari and Asyik 2023). Pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi sumber pendapatan utama di Sulawesi Tengah. Meski begitu, efektivitas pajak ini dalam mendukung belanja modal masih menjadi persoalan, karena adanya fluktuasi dalam tingkat kepatuhan wajib pajak serta perubahan kebijakan yang memengaruhi jumlah penerimaan daerah.

Retribusi daerah juga memiliki peran penting sebagai komponen PAD yang mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan lokal (Sudika and Budiarta 2017). Kapasitas suatu daerah dalam menggali potensi lokal sangat bergantung pada kemampuannya mengubah potensi ekonomi menjadi aktivitas yang menghasilkan pendapatan guna menopang pembangunan berkelanjutan (Muchtar, Abbas, and Santoso 2024). Jenis retribusi seperti retribusi pasar dan IMB memberikan kontribusi signifikan, meski tantangan dalam pengumpulan dan penyalurannya menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi pengelolaan. Optimalisasi retribusi daerah dinilai dapat meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tengah.

Dana perimbangan dari pemerintah pusat merupakan alat fiskal utama dalam mendukung pembangunan di daerah (Samudra and Sugeng 2020; Simanjuntak and Ginting 2019; Soesilo and Asyik 2021; Suryantini 2017; Widiani, Zahro, and Susanti 2022). Dana ini digunakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, termasuk untuk belanja modal, dan difokuskan pada proyek-proyek infrastruktur strategis di wilayah Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap alokasi dan efektivitas penggunaannya penting untuk memastikan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Pengelolaan dana perimbangan yang tepat akan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan perbaikan fasilitas publik.

Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penting dalam menilai kemajuan pembangunan suatu daerah karena mencerminkan dinamika di berbagai sektor ekonomi (Adyatama and Oktaviani 2015). Di Sulawesi Tengah, pertumbuhan ekonomi diduga berperan sebagai moderator yang penting dalam hubungan antara penerimaan fiskal dan belanja modal. Daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi diharapkan lebih efisien dalam mengalihkan pendapatan dari pajak, retribusi, dan dana perimbangan menjadi investasi pembangunan. Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji dampak penerimaan pajak, retribusi, dan transfer fiskal terhadap pengeluaran daerah, analisis mengenai peran intervening pertumbuhan ekonomi masih sangat terbatas, terutama di wilayah Sulawesi Tengah. Kajian ini berupaya menjawab gap pengetahuan tersebut dengan meneliti mekanisme moderasi pertumbuhan ekonomi dalam hubungan antara variabel-variabel fiskal dan alokasi belanja investasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi empiris bagi penyusunan strategi fiskal yang tepat guna serta pemanfaatan anggaran yang optimal untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di provinsi tersebut.

TINJAUAN LITERATUR

Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah merupakan komponen krusial dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan utama untuk belanja investasi pemerintah daerah. Berbagai studi empiris mengungkapkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak daerah mampu meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi regional. Namun demikian, bukti-bukti penelitian mengenai korelasi antara pajak daerah dan alokasi belanja modal menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Beberapa temuan penelitian, seperti yang dilaporkan Aspan et al. (2016) dalam konteks Pemerintah Kota Banda Aceh periode 2006-2013, justru mengindikasikan tidak adanya pengaruh statistik yang berarti. Pola serupa juga ditemukan dalam riset Harianto dan Chechelya Aulia Savira Putri (2021) di Balikpapan serta Muchtar et al. (2024) yang menganalisis kabupaten/kota di Bengkulu. Di sisi lain, hasil investigasi Samudra & Sugeng (2020) di Jawa Timur, Simanjuntak & Ginting (2019) di Sumatera Utara, bersama dengan temuan Murti & Trisnawati (2021), justru membuktikan adanya hubungan positif yang signifikan. Disparitas temuan ini mengisyaratkan bahwa efek pajak daerah terhadap belanja modal bersifat kontekstual, tergantung pada faktor-faktor seperti kondisi lokal, struktur ekonomi, dan kapasitas keuangan daerah masing-masing.

Retribusi Daerah

Sebagai unsur vital dalam komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi daerah menawarkan potensi strategis untuk memperkuat kemampuan keuangan pemerintah daerah. Ketika dikelola secara efektif, sumber pendapatan ini dapat menjadi instrumen kunci dalam mendanai berbagai pengeluaran produktif, khususnya untuk program pembangunan infrastruktur dan perbaikan kualitas pelayanan masyarakat. Namun, literatur empiris mengenai korelasi antara retribusi daerah dan alokasi belanja modal menunjukkan inkonsistensi yang menarik. Studi oleh Aspan et al. (2016) di Kota Banda Aceh periode 2006-2013 justru mengungkapkan tidak adanya pengaruh yang berarti. Di sisi berlawanan, temuan Muchtar et al. (2024) di Bengkulu dan analisis Samudra & Sugeng (2020) di Jawa Timur secara tegas menunjukkan dampak positif yang signifikan. Simanjuntak & Ginting (2019) juga melaporkan pola serupa di Sumatera Utara. Namun demikian, riset terpisah oleh Harianto & Putri (2021) di Balikpapan serta Murti & Trisnawati (2021) gagal menemukan hubungan yang signifikan. Variasi temuan ini menguatkan tesis bahwa dampak retribusi daerah bersifat kondisional, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor spesifik seperti karakteristik wilayah dan kapasitas manajemen fiskal daerah bersangkutan.

Dana Perimbangan

Mekanisme transfer fiskal melalui dana perimbangan berfungsi sebagai instrumen krusial dalam mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia, dengan tujuan utama meminimalisasi disparitas kapasitas fiskal antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar wilayah. Secara khusus, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai komponen strategis dalam skema ini berpotensi meningkatkan kemampuan keuangan daerah-daerah dengan basis PAD terbatas, sekaligus memperkuat alokasi anggaran investasi untuk mendukung pencapaian target pembangunan. Berbagai studi empiris telah mengkaji dampak dana perimbangan terhadap belanja modal dengan hasil yang beragam. Penelitian Aspan et al. (2016) mengkonfirmasi pengaruh positif baik DAU maupun DAK terhadap pengeluaran modal di Kota Banda Aceh. Temuan menarik dari Lestari & Basuki (2024) mengungkapkan bahwa hanya DAK yang menunjukkan signifikansi statistik di Nusa Tenggara Barat, sementara komponen lainnya tidak berdampak berarti. Konsistensi hasil ini terlihat dalam studi Samudra & Sugeng (2020) di Jawa Timur, DAK kembali menunjukkan pengaruh positif yang jelas. Lebih lanjut, Soesilo & Asyik (2021) memberikan validasi tambahan mengenai efektivitas DAK dalam konteks geografis yang serupa.

Sebagai pembanding, studi Suryantini (2017) mengungkapkan bahwa seluruh komponen transfer fiskal (DAU, DAK, dan DBH) secara simultan berdampak signifikan terhadap alokasi belanja investasi di Bali selama 2010-2015. Temuan ini diperkuat oleh Kuntadi et al. (2022) serta Murti & Trisnawati (2021) yang sama-sama menegaskan efektivitas DAK dalam mendorong pengeluaran modal. Namun, literatur kontemporer menunjukkan adanya disparitas hasil penelitian. Eksandy et al. (2018) gagal menemukan pengaruh signifikan DAK di Banten, sebagaimana dikonfirmasi oleh Harianto & Putri (2021) dalam konteks Balikpapan. Konsistensi temuan negatif ini semakin kuat dengan dukungan berbagai peneliti lain Ayem & Pratama, 2018; Jaeni & L, 2016; Jayanti, 2020b; Muchtar et al., 2024; Rahmitasari & Asyik, 2023; Simanjuntak & Ginting, 2019 yang secara kolektif menunjukkan ketiadaan hubungan kausal antara DAK dan belanja modal. Dinamika ini mengindikasikan bahwa efektivitas transfer fiskal - khususnya DAK - sangat tergantung pada tiga faktor kunci yaitu kesehatan keuangan daerah, kapasitas manajerial dalam pengelolaan anggaran, dan keselarasan antara prioritas pembangunan daerah dengan alokasi dana transfer.

Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja ekonomi regional dapat berperan sebagai faktor pemoderasi dalam menganalisis hubungan antara sumber-sumber pendapatan daerah dan alokasi belanja investasi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi umumnya berkorelasi dengan peningkatan penerimaan fiskal daerah, yang pada gilirannya memperluas kapasitas anggaran pemerintah lokal untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Stabilitas pertumbuhan ekonomi juga menciptakan ruang kebijakan yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam merencanakan program pembangunan berkelanjutan. Secara khusus, peran moderasi pertumbuhan ekonomi terlihat jelas dalam interaksinya dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Studi Alvaro & Wibowo (2020) mengungkapkan bahwa dinamika ekonomi regional mampu memperkuat efektivitas DAK dalam mendorong belanja modal di berbagai provinsi. Temuan serupa dilaporkan oleh Andaresta (2021) dalam konteks Kalimantan Barat, di mana pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai katalis dalam hubungan DAK-belanja modal. Namun, kontradiksi muncul dalam penelitian Rahmitasari & Asyik (2023) yang tidak menemukan efek moderasi yang signifikan. Perbedaan temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi bersifat kontekstual, tergantung pada: karakteristik ekonomi lokal, kapasitas fiskal daerah, dan kualitas tata kelola anggaran daerah.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif dengan kombinasi analisis deskriptif dan eksplanatoris untuk mengevaluasi: 1) dampak penerimaan pajak daerah, retribusi, dan transfer fiskal

pusat terhadap alokasi belanja investasi, serta 2) peran moderasi pertumbuhan ekonomi regional. Studi ini mencakup seluruh wilayah administrasi kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah sebagai unit observasi, dengan periode pengamatan selama lima tahun (2019-2023). Sumber data primer diperoleh melalui dokumen resmi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi Pajak Daerah (X1), yang diukur berdasarkan jumlah total penerimaan dari pajak daerah; Retribusi Daerah (X2), yang dihitung dari total pendapatan retribusi; dan Dana Perimbangan (X3), yang diukur berdasarkan total dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Sementara itu, variabel dependen adalah Belanja Modal (Y), yang diukur dari total anggaran belanja modal yang telah direncanakan dan direalisasikan oleh pemerintah daerah. Variabel moderasi dalam studi ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (M), yang diukur melalui tingkat pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Penelitian ini menerapkan model regresi multivariat untuk menguji hubungan kausal antara variabel bebas dan alokasi belanja investasi. Analisis regresi interaksi *Moderated Regression Analysis* (MRA) dilaksanakan melalui software *SPSS Statistics* guna mengkaji efek moderasi yang ditimbulkan oleh pertumbuhan ekonomi terhadap keterkaitan antara pendapatan asli daerah (meliputi pajak dan retribusi) serta transfer fiskal pusat dengan pengeluaran modal.

HASIL

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	65	4.800.752	193.914.200	37.219.943	44.821.350
Retribusi Daerah	65	1.912.096	170.239.000	22.231.621	37.680.793
Dana Perimbangan	65	514.870.957	1.968.606.913	977.739.960	293.733.474
Pertumbuhan Ekonomi	65	1.607.822.000	84.987.000.000	12.010.789.978	15.158.842.244
Belanja Modal	65	46.011.729	487.313.774	212.829.836	74.358.728

Sumber: Data diolah, 2025

Analisis distribusi pendapatan fiskal di tingkat kabupaten/kota Sulawesi Tengah mengungkapkan disparitas yang signifikan. Penerimaan dari pajak dan retribusi daerah menunjukkan pola yang timpang, dimana mayoritas wilayah memiliki realisasi pendapatan yang secara substansial lebih rendah dibandingkan potensi maksimalnya. Fenomena ini tercermin dari nilai rata-rata yang secara konsisten berada pada level rendah ketika dibandingkan dengan angka tertinggi yang dicapai.

Sementara itu, alokasi dana perimbangan antardaerah memperlihatkan variabilitas yang cukup tinggi. Meskipun nilai tengahnya termasuk dalam kategori besar, dispersi yang lebar mengindikasikan adanya ketidakmerataan dalam pembagian transfer fiskal ini. Pada aspek ekonomi makro, PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi regional menunjukkan heterogenitas yang nyata antarwilayah, yang dibuktikan dengan besarnya simpangan baku - menggambarkan kesenjangan perkembangan ekonomi yang cukup tajam.

Berbeda dengan pola tersebut, alokasi belanja investasi justru menunjukkan tingkat keseragaman yang relatif lebih baik. Walaupun terdapat variasi antardaerah, nilai rata-rata yang tinggi disertai dengan simpangan baku yang lebih kecil dibanding variabel lainnya mengisyaratkan bahwa ketidakseimbangan dalam pengeluaran modal antarkabupaten/kota di Sulawesi Tengah tidak terlalu ekstrem.

Tabel 2. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model	R	R.Square	Adjusted R.Square	Std. Error of the Estimate
1	0,686	0,470	0,435	55.903.214

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,686, yang menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat dan bersifat positif antara variabel bebas, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, serta dana perimbangan, dengan variabel terikat berupa belanja modal. Sementara itu, nilai *R Square* sebesar 0,470 mengisyaratkan bahwa sekitar 47% variasi dalam belanja modal dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut dalam model regresi. Artinya, pengaruh dari pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap belanja modal mencakup sebesar 47%, sedangkan sisanya sebesar 53% berasal dari faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Adapun nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,435 menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan jumlah variabel dan ukuran sampel, model ini mampu menjelaskan sekitar 43,5% variasi yang terjadi dalam belanja modal.

Tabel 3. Hasil Regresi Berganda dan *Moderated Regression Analysis*

Variabel	Unstandardized B	t	Sig.	Keterangan
Constant (C)	104.544.574			
Pajak Daerah (X1)	0,478	1,893	0,063	Tidak Signifikan
Retribusi Daerah (X2)	0,301	0,809	0,422	Tidak Signifikan
Dana Perimbangan (X3)	0,074	2,815	0,007	Signifikan
Pertumbuhan Ekonomi (M)	0,001	0,777	0,440	Tidak Signifikan
Interaksi PD*M (X1*M)	1,098	0,179	0,858	Tidak Signifikan
Interaksi RD*M (X2*M)	-6,647	0,953	0,344	Tidak Signifikan
Interaksi DP*M (X3*M)	3,571	4,004	0,000	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2025

Berikut merupakan model persamaan hasil regresi melalui *Moderated Regression Analysis* (MRA):

$$Y = 104.544.574 + 0,478(X1) + 0,301(X2) + 0,074(X3) + 0,001(M) + 1.098(X1.M) + 6.647(X2.M) + 3.571(X3.M) + \epsilon$$

PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan yang diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Dengan peningkatan kapasitas fiskal, pemerintah daerah diharapkan mampu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk !belanja modal, khususnya dalam !rangka pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Hasil ini menunjukkan bahwa pajak daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal di kabupaten/kota di !Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu penyebab utama dari temuan ini adalah rendahnya penerimaan pajak daerah di sebagian besar wilayah di provinsi tersebut. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan hal ini antara lain terbatasnya basis pajak, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, serta kelemahan dalam sistem administrasi perpajakan. Kondisi ini menyebabkan pendapatan dari pajak daerah yang berhasil dikumpulkan belum cukup besar untuk memberikan dampak nyata terhadap belanja modal secara keseluruhan. Pemerintah !kabupaten/kota di Sulawesi Tengah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana !Alokasi Khusus (DAK). Ketergantungan ini !cenderung mengurangi sensitivitas !belanja modal terhadap fluktuasi !pendapatan dari pajak daerah, karena pemerintah daerah lebih mengandalkan dana transfer pusat dibandingkan dengan sumber penerimaan lokal dalam mendanai proyek-proyek pembangunan.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aspan et al. (2016), yang tidak menemukan hubungan signifikan antara pajak daerah dan belanja modal di Kota Banda Aceh. Hasil serupa juga diperoleh dalam studi oleh Pudjut Harianto & Chechelya Aulia Savira Putri (2021) serta Muchtar et al. (2024), yang menyatakan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan !terhadap belanja modal di Kota Balikpapan dan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Sebaliknya, hasil berbeda ditemukan !pada penelitian yang !dilakukan di Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara, di mana studi oleh Samudra & Sugeng (2020) serta Simanjuntak & Ginting (2019) menunjukkan bahwa pajak daerah memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap peningkatan belanja modal di daerah-daerah tersebut.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Pendapatan dari retribusi daerah dapat !berkontribusi dalam meningkatkan belanja modal yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal di kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu penjelasan yang mungkin adalah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat !dalam membayar biaya retribusi, yang !secara langsung mempengaruhi total pendapatan yang terkumpul. Selain itu, pendapatan dari retribusi daerah dapat dialokasikan untuk! kebutuhan yang lebih mendesak daripada belanja modal. Dalam banyak kasus, dana ini digunakan untuk menutupi biaya operasional !dan pemeliharaan yang terkait dengan layanan yang menghasilkan retribusi, seperti operasi pasar, pengelolaan parkir, dan kegiatan serupa lainnya. Akibatnya, anggaran yang tersedia untuk belanja modal tetap terbatas. Selain itu, kualitas layanan publik yang didanai oleh retribusi daerah mungkin tidak cukup memadai untuk mendorong peningkatan yang signifikan dalam pengumpulan pendapatan. Sebagai contoh, jika pasar, fasilitas parkir, atau layanan publik lainnya tidak memiliki pemeliharaan dan efisiensi yang memadai, masyarakat mungkin tidak mau membayar biaya yang diperlukan. Hal ini pada akhirnya menyebabkan rendahnya pendapatan retribusi, yang berdampak minimal pada belanja modal.

Temuan ini !mendukung penelitian Aspan et al. (2016) yang mengindikasikan !dampak minimal pajak daerah !terhadap belanja modal di Banda Aceh. Efek yang tidak signifikan serupa juga ditemukan oleh Pudjut Harianto & Chechelya Aulia Savira Putri (2021) dan Murti & Trisnawati (2021) dalam studi mereka masing-masing tentang pajak daerah. Namun, bukti yang kontras muncul dari studi regional yang dilakukan oleh Muchtar et al. (2024) di Bengkulu, Samudra & Sugeng (2020) di Jawa Timur, serta Simanjuntak & Ginting (2019) di Sumatera Utara, yang semuanya menunjukkan hubungan positif yang signifikan secara statistik antara pendapatan pajak daerah dan! alokasi belanja modal.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Dana perimbangan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal di kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Di banyak daerah, DAU dan DAK menjadi sumber utama pembiayaan. Sifatnya yang rutin dan dapat diprediksi setiap tahun memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam merancang serta melaksanakan proyek-proyek belanja modal secara lebih terencana dan efisien. DAK khususnya sering kali dialokasikan secara langsung untuk pembiayaan proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, sarana pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Dukungan dana ini meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk melaksanakan proyek-proyek berskala besar yang tidak dapat dibiayai sepenuhnya dari PAD. Sejalan dengan hasil penelitian Aspan et al. (2016), menunjukkan bahwa DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kota Banda Aceh. Hasil yang mendukung juga terlihat dalam studi Suryantini (2017) di Provinsi Bali, yang menunjukkan bahwa semua komponen dana perimbangan DAK, DAU, dan DBH memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Kuntadi et al. (2022) juga mengonfirmasi pengaruh positif DAK dan DAU, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Lestari & Basuki (2024), Samudra & Sugeng (2020), Soesilo & Asyik (2021), yang menunjukkan kontribusi signifikan DAK dalam pembiayaan belanja modal.

Namun demikian, terdapat pula studi yang menemukan hasil yang berbeda. Beberapa penelitian, seperti oleh Jayanti (2020), Muchtar et al. (2024), Rahmitasari & Asyik (2023), Simanjuntak & Ginting (2019), Ayem & Pratama (2018), serta Jaeni (2016), menyatakan bahwa DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal di wilayah yang mereka teliti. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas dana perimbangan dalam memengaruhi belanja modal sangat mungkin dipengaruhi oleh konteks daerah masing-masing, termasuk tata kelola anggaran, kebutuhan pembangunan, serta ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal yang di Moderasi Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi secara signifikan hubungan antara pajak daerah dan belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah. Artinya, meskipun beberapa daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, hal tersebut belum mampu memperkuat pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap belanja modal. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh skala penerimaan pajak yang masih rendah dan basis pajak yang terbatas. Pertumbuhan ekonomi belum secara nyata mendorong peningkatan signifikan dalam pendapatan pajak daerah, sehingga dampaknya terhadap alokasi belanja modal tetap terbatas. Selain itu, struktur ekonomi daerah yang cenderung didominasi oleh sektor-sektor dengan kontribusi pajak yang rendah, seperti pertanian dan perikanan, turut menjadi faktor penghambat dalam memperkuat peran pajak daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat juga mengurangi urgensi bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan penerimaan pajak lokal, bahkan ketika pertumbuhan ekonomi terjadi.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi sering dipandang sebagai indikator utama kemajuan pembangunan suatu wilayah. Secara teoritis, peningkatan pertumbuhan ekonomi seharusnya mampu memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah, sehingga mendorong alokasi dana yang lebih besar untuk belanja modal, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik (Adyatama and Oktaviani 2015). Namun, hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap belanja modal di wilayah Sulawesi Tengah. Banyak daerah di provinsi ini masih sangat bergantung pada sumber dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ketergantungan ini menghambat kemampuan daerah untuk menerjemahkan pertumbuhan ekonomi menjadi peningkatan PAD yang berarti, sehingga kontribusinya terhadap belanja modal menjadi

terbatas.

Karakteristik ekonomi lokal di banyak daerah cenderung bertumpu pada sektor-sektor yang tidak memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah. Misalnya, sektor pertanian, pertambangan, dan perikanan mungkin mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak serta-merta meningkatkan penerimaan pajak yang signifikan bagi daerah. Akibatnya, meskipun pertumbuhan ekonomi berlangsung, hal itu tidak diiringi dengan peningkatan belanja modal yang sepadan. Selain itu, jika pengelolaan keuangan daerah tidak dilakukan secara optimal, maka pertumbuhan pendapatan pun tidak akan secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan belanja modal. Ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran dapat menyebabkan alokasi dana yang tidak tepat sasaran atau pemanfaatan anggaran yang kurang efektif.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal yang di Moderasi Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berfungsi sebagai variabel moderasi yang signifikan dalam hubungan antara pendapatan dari retribusi daerah dan belanja modal pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Meskipun terjadi peningkatan aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah, hal tersebut belum mampu memperkuat keterkaitan antara penerimaan retribusi dan pengeluaran untuk investasi infrastruktur. Salah satu faktor yang menjadi kendala adalah sempitnya basis pendapatan dari retribusi daerah, yang disebabkan oleh mekanisme pemungutan yang belum optimal, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran retribusi, serta prioritas penggunaan dana retribusi yang lebih banyak diarahkan untuk pembiayaan operasional dan pemeliharaan layanan publik daripada untuk pembiayaan proyek-proyek modal. Dengan demikian, meskipun ekonomi daerah mengalami pertumbuhan, keterbatasan struktural tersebut membuat kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan belanja modal tetap tidak signifikan. Pendapatan yang diperoleh dari retribusi masih belum memadai untuk menjadi sumber pembiayaan utama bagi pembangunan infrastruktur jangka panjang.

Lebih lanjut, peningkatan penerimaan retribusi yang dipicu oleh pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta berdampak besar terhadap belanja modal apabila pengelolaan anggaran daerah tidak dilakukan secara efisien. Dengan kata lain, meskipun ada pertumbuhan ekonomi, retribusi daerah tidak cukup kuat dalam meningkatkan pengaruhnya terhadap belanja modal. Di banyak wilayah di Sulawesi Tengah, potensi retribusi dari layanan publik masih belum dimanfaatkan secara optimal karena berbagai tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur pendukung, sistem penarikan retribusi yang belum efektif, serta rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal yang di Moderasi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi terbukti memperkuat hubungan antara dana perimbangan dan belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, semakin besar pula kontribusi dana perimbangan dalam mendorong peningkatan belanja modal. Kondisi ekonomi yang stabil dan berkembang mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, sehingga pemanfaatan dana perimbangan menjadi lebih optimal dalam membiayai proyek-proyek modal. Daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik juga cenderung memiliki fleksibilitas anggaran yang lebih tinggi, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana perimbangan secara maksimal guna mendukung pembangunan infrastruktur dan pengeluaran modal lainnya.

Daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi yang positif umumnya menunjukkan kapasitas yang lebih tinggi dalam aspek pengelolaan keuangan serta tata kelola pemerintahan. Hal ini tercermin dalam kemampuan merancang perencanaan yang matang, pelaksanaan program yang efektif, serta pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai melalui dana perimbangan. Dengan

sistem pemerintahan yang lebih terorganisir, alokasi dana dapat dikelola dengan lebih baik sehingga meningkatkan efektivitas penggunaannya dalam belanja modal. Selain itu, kemajuan ekonomi juga cenderung menarik partisipasi lebih besar dari sektor swasta. Kolaborasi yang terbangun antara pemerintah dan dunia usaha dalam situasi ekonomi yang kondusif dapat mempercepat pembangunan fasilitas umum dan meningkatkan kualitas layanan publik, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat di wilayah Sulawesi Tengah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Sebaliknya, dana perimbangan menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi secara langsung juga tidak memberikan dampak yang berarti terhadap belanja modal. Namun demikian, variabel pertumbuhan ekonomi berperan secara signifikan sebagai pemoderasi dalam hubungan antara dana perimbangan dan belanja modal. Sebaliknya, peran moderasi pertumbuhan ekonomi dalam hubungan antara pajak daerah maupun retribusi daerah terhadap belanja modal tidak menunjukkan hasil yang signifikan.

IMPLIKASI

Pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak serta retribusi daerah melalui optimalisasi basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan reformasi sistem pemungutan. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat dan memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai belanja modal secara mandiri. Selain itu, dana perimbangan harus dikelola lebih strategis agar sejalan dengan arah pertumbuhan ekonomi lokal dan diarahkan pada belanja modal yang produktif. Hasil studi ini memperkuat teori flypaper effect dan menyoroti pentingnya pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi yang mampu memperkuat efektivitas dana perimbangan terhadap belanja modal. Namun, keterbatasannya dalam memoderasi pengaruh pajak dan retribusi daerah menunjukkan bahwa kapasitas fiskal lokal tidak otomatis meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu pendekatan fiskal yang lebih adaptif dan berbasis karakteristik ekonomi daerah.

BATASAN

Periode observasi yang relatif pendek, yakni hanya lima tahun, serta ruang lingkup variabel yang terbatas dan belum mencakup sejumlah faktor penting lainnya yang mungkin berpengaruh. Selain itu, pendekatan analisis yang digunakan dalam studi ini hanya terbatas pada metode *Moderated Regression Analysis* (MRA).

REKOMENDASI

Untuk memperdalam analisis, dapat digunakan periode waktu yang lebih panjang, serta memperluas cakupan variabel seperti efisiensi administrasi fiskal, kualitas tata kelola pemerintah daerah, dan mempertimbangkan penggunaan variabel mediasi. Dari sisi metodologi, analisis lanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM)

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatama, Erdi, And Rachmawati Meita Oktaviani. 2015. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Pemoderasi." Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Stikubank 4(19979-4878): 190-205.
- Alvaro, Rendy, And Adhi Prasetyo Satrio Wibowo. 2020. "Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Pada

- Provinsi Di Indonesia.” *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara* 5(2): 103–20. Doi:10.22212/Jbudget.V5i2.102.
- Andaresta, Sylvia. 2021. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019).” *Jurnal Kiafe:Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi* 10(4).
- Aspan, Henry, Muammar Khaddafi, And Indawati Lestari. 2016. “The Effect Of Local Taxes, Local Levies, General Allocation Funds (Dau), And Special Allocation Funds (Dak) To The Government Capital Expenditures Of Banda Aceh City.” In *Universitas Negeri Semarang*, 513–26.
- Ayem, Sri, And Dessy Dyah Pratama. 2018. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016.” *Jurnal Akuntansi Dewantara* 2(2): 169–82. Doi:10.29230/Ad.V2i2.2987.
- Eksandy, Arry, Mohamad Zulman Hakim, And Ekawati. 2018. “Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015).” *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Tangerang* (2009): 85–94.
- Jaeni, Greg, And Anggana L. 2016. “Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal.” *Universitas Stikubank Semarang* (2005): 692–702.
- Jayanti, Fitri Dwi. 2020. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018.” *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 8(3): 335–41. Doi:10.35794/Emba.V8i3.30045.
- Kuntadi, Cris, Andre Pamungkas, Daniyyah Damar Fitriyanti, And Sofyanti Astri. 2022. “Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 2(3): 278–89. Doi:10.38035/Jihhp.V2i3.1040.
- Lestari, Rahayu Intan, And Prayitno Basuki. 2024. “The Effect Of Economic Growth, Local Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, And Profit Sharing Fund On Capital Expenditure Of The Ntb Provincial Government.” *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis* 07(01): 62–70. Doi:10.47191/Ijmra/V7-I01-10.
- Muchtar, Muhammad Farhan, Dirvi Surya Abbas, And Sigit Budi Santoso. 2024. “Muchtar.Pdf.” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 2(1): 21–34. Doi:Https://Doi.Org/10.59246/Muqaddimah.V1i3.571.
- Murti, Sonia, And Rina Trisnawati. 2021. “Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pad Yang Sah, Dan Dak Pada Belanja Modal.” *Perspektif Akuntansi* 4(2): 105–19. Doi:10.24246/Persi.V4i2.P105-119.
- Pudjut Harianto, Rudy, And Chechelya Aulia Savira Putri. 2021. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Balikpapan.” *Jurnal Geoekonomi* 12(2): 244–59. Doi:10.36277/Geoekonomi.V12i2.153.
- Rahmitasari, Addin Nurma, And Nur Fadjrih Asyik. 2023. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 12(8): 1–23.
- Samudra, Edo, And Sugeng. 2020. “Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.” *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi* (September): 226–34.
- Simanjuntak, Arthur, And Christina Ginting. 2019. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana

- Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah.” *Jurnal Manajemen* 5(2): 183–94. [Http://Ejournal.Lmiimedan.Net](http://Ejournal.Lmiimedan.Net).
- Soesilo, Alfina Fadhila, And Nur Fadjrih Asyik. 2021. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Bantuan Provinsi, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10(4): 21.
- Sudika, I Komang, And I Ketut Budiarta. 2017. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 21(2): 1689–1718.
- Suryantini, Ni Putu Santi. 2017. “The Influence Of Dau (General Allocation Fund) And Dak (Special Allocation Fund) On Capital Expenditure Of Bali Province.” *Economics And Business Solutions Journal* 1(2): 1. Doi:10.26623/Ebsj.V1i2.620.
- Wahyudi, Maria Valencia, And Nur Handayani. 2015. “Pengaruh Pajak, Retribusi Daerah, Dau, Dan Dak Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal.” *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4(11): 1–17.
- Widiani, Dina, Nafi’ Inayati Zahro, And Diah Ayu Susanti. 2022. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal.” *Jurnal Akuntansi Publik* 2(2): 1–9. Doi:10.30591/Jpa.V2i2.